



## **PERANAN ORGANISASI UNI EROPA DALAM MENGATASI KRISIS KEUANGAN NEGARA YUNANI**

**Pahlevi, Raden Mohammad Riezky**  
**Dosen Prodi Sistim Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika**  
**(Naskah diterima: 1 Maret 2019, disetujui: 20 April 2019)**

### *Abstract*

*The role of the European Union Organization in overcoming the Greek State financial crisis by running the Economic Adjustment Program(Economic savings Program) implemented by the Greek Government. The data used are secondary data because the scientific research of International Relations uses qualitative data. The data collection method used in this study is the literature of books, websites. Techniques of data analysis using qualitative analysis. The results of the study indicate that the European Union Organization succeeded in getting the Greek State out of its financial crisis.*

**Keywords:** Role, European Union, Greek State Financial Crisis

### **Abstrak**

Peran Organisasi Uni Eropa dalam mengatasi krisis keuangan Negara Yunani dengan menjalankan program Economic Adjustment Program (Program Penghematan Ekonomi) yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintahan Negara Yunani dengan baik. Data yang digunakan adalah data sekunder karena penelitian keilmuan Hubungan Internasional menggunakan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku-buku, website. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Uni Eropa berhasil membuat Negara Yunani keluar dari krisis keuangannya.

**Kata Kunci:** Peranan, Uni Eropa, Krisis Keuangan Negara Yunani

### **I. PENDAHULUAN**

**K**risis ekonomi yang terjadi di Negara Yunani pada tahun 2008 yang berefek domino pada negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Uni Eropa lainnya menarik perhatian dunia internasional. Negara Yunani tidak dapat mampu

membayar utang sebesar 4 miliar euro kepada Negara Perancis, Jerman, Inggris, Portugal, Amerika, dan Italia. Banyaknya utang yang harus dibayar oleh Negara Yunani merupakan akumulasi defisit yang telah lama terjadi dari tahun 1974. Selain itu, buruknya kinerja birokrasi Pemerintahan Negara Yunani menyebab-

kan permasalahan menjadi semakin kompleks. Korupsi, buruknya administrasi pajak, dan pemborosan anggaran membuat Negara Yunani harus berhutang untuk menutupi kebutuhan belanja negara yang terus membengkak. Keanggotaan Negara Yunani di Organisasi Uni Eropa dan zona euro pada awalnya tidak diterima begitu saja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti berada di wilayah bagian daripada Benua Eropa, berada dalam kondisi politik yang stabil, dan memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak akan mengganggu stabilitas Organisasi Uni Eropa. Meskipun Negara Yunani tidak memiliki ekonomi yang mapan, namun Negara Yunani terus berusaha untuk bergabung dengan Organisasi Uni Eropa. Pada saat awal bergabung dengan Organisasi Uni Eropa, Negara Yunani mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kompetisi pasar industri Eropa Utara yang sudah lebih maju dan mapan.

Pada saat akan bergabung dengan zona euro, Negara Yunani tidak dapat memenuhi persyaratan yang tercantum dalam perjanjian Maastricht karena defisit anggaran, inflasi, suku bunga, dan utang yang tinggi dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas zona euro. Namun, pada Bulan Januari Tahun 2002, Negara Yunani resmimenjadi keanggo-

taan zona euro karena dianggap memenuhi persyaratan. Besarnya utang Negara Yunani yang terus menumpuk tidak mendapat perhatian dan peringatan dari Organisasi Uni Eropa, sampai akhirnya pada tahun 2010 diketahui bahwa Negara Yunani telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lainnya untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnya dari utang pemerintah. Akhirnya Organisasi Uni Eropa dapat mengetahui informasi tersebut karena kecurigaan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara Yunani. Pada tahun 2000 hingga Tahun 2007, Negara Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 4,2% per tahun dan merupakan angka tertinggi di zona Eropa. Pertumbuhan ekonomi di Yunani merupakan hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Namun, keadaan berbalik ketika pasca krisis global 2008 dimana negara-negara lain mulai bangkit dari resesi, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata dan perkapalan, justru mencatat penurunan pendapatan hingga 15%. Selanjutnya pada Bulan Mei 2010, Negara Yunani diketahui telah mengalami defisit hingga 13.6%. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut dikarenakan banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara

hingga US\$ 20 milyar per tahun, (“Efek Domino Krisis Yunani Terhadap Stabilitas Perekonomian Di Uni Eropa.” Diakses dari: <http://astrianariasiburian.blogspot.com/search?updatedmin=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&maxresults=1> tanggal 2 Maret 2019)

Permasalahan fiskal yang terjadi di Yunani mulai menjadi perhatian dunia internasional setelah pemilihan legislatif pada Bulan Oktober Tahun 2009. Beberapa minggu sebelumnya telah terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani, George Papandreou mengumumkan bahwa persentase defisit Yunani sebenarnya mencapai 12,7% dari jumlah PDB. Jumlah ini tentunya memiliki selisih yang jauh dari total defisit yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Costas Karamanlis, yaitu sebesar 6%. Defisit fiskal Negara Yunani semakin memburuk secara signifikan seiring dengan memburuknya dampak krisis ekonomi global 2008 yang melanda tidak hanya negara di Eropa, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Setelah mengalami dinamika perekonomian yang fluktuatif, akhirnya pada tahun 2009 Yunani memasuki resesi yang berkepanjangan. Defisit fiskal yang Yunani yang terakumulasi dari hutang yang membengkak memicu terjadinya Krisis Eko-

nomi. *Balance of payment* Yunani sendiri selalu menunjukkan angka defisit yang konsisten jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya khususnya di Eropa. Krisis yang terjadi di Yunani pada tahun 2009 sampai saat ini membuat kestabilan organisasi kawasan ini juga terkena dampaknya, salah satunya jatuhnya nilai euro. Keputusan membuat euro sebagai mata uang tunggal ternyata juga membawa dampak buruk bagi perekonomian Uni Eropa. Sejak krisis Yunani ini, terjadi penurunan kepercayaan mata uang Euro secara signifikan dari investor-investor asing di Eropa. Krisis Yunani menunjukkan berbagai sikap yang berbeda diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota mempunyai semangat dan sudut pandang berbeda dalam menyelamatkan Yunani sebagai negara anggota organisasi Uni Eropa. Hal ini dikarenakan awal kehadiran mereka membentuk dan ikut serta dalam keanggotaan Uni Eropa tentu dikarenakan kepentingan yang berbeda-beda yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Kurangnya kontrol terhadap pengaturan kebijakan fiskal terhadap negara anggota yang memakai mata uang Euro juga menjadi sorotan.

Melalui krisis ini terlihat bahwa Bank Sentral Eropa seperti kehilangan pengawasan

terhadap kebijakan fiskal negara-negara anggota Organisasi Uni Eropa. Tentunya krisis ini dapat mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara anggota Organisasi Uni Eropa lainnya terutama yang tergolong lemah.

Banyak pihak mulai menanyakan keberadaan, kemapanan serta kesolidan diantara para anggota Organisasi Uni Eropa. Isu ini dilandasi oleh kenyataan yang ada mengenai ketidak mampuan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di zona Eropa. Apalagi kemudian juga muncul wacana untuk mengeluarkan Negara Yunani dari zona euro. Hal ini tentunya didasarkan akan kekhawatiran yang beralasan, disamping ada negara-negara di Uni Eropa yang tidak mematuhi kesepakatan, pemalsuan laporan kualifikasi Negara Yunani yang telah berhasil mengelabui Uni Eropa bertahun-tahun membuat masyarakat internasional semakin meragukan kredibilitas Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mapan. Padahal Organisasi Uni Eropa memiliki Bank Sentral Eropa yang bekerja yang dikelola berdasarkan *European System of Central Banks* (ESCB) untuk menjaga stabilitas harga dalam Uni Eropa dengan cara menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan moneter negara anggota, menentukan nilai tukar euro dengan mata uang nasional, memegang dan

mengelola nilai tukar mata uang resmi negara anggota, dan mempromosikan kelancaran sistem pembayaran. (*Europa Summaries of European Union Legislation. “The European Central Bank (ECB)”,* diakses melalui

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/economics\\_and\\_monetary\\_af-Fairs\\_institutional\\_and\\_economics\\_framework/o10001\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/economics_and_monetary_af-Fairs_institutional_and_economics_framework/o10001_en.htm), pada tanggal 4 Maret 2019)

Berlandaskan pada segala permasalahan yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa krisis yang melanda negara-negara Eropa, khususnya Negara Yunani memiliki efek atau dampak yang signifikan dan berskala regional, terlebih pada dampak yang mengancam kredibilitas dan eksistensi dari Organisasi Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mana Negara Yunani pada saat ini menjadi anggota organisasi tersebut. Hingga saat ini, perjalanan penyelesaian krisis keuangan yang melanda Negara Yunani telah sampai pada tahap penyelesaian krisis tersebut. Penulis sangat tertarik dan ingin mengetahui peran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai organisasi regional terbesar di *euro zone*, dan bagaimana setiap kebijakan tersebut mampu menyelesaikan krisis dan menyelamatkan Yunani sebagai sebuah negara yang merupakan negara pelopor peradaban barat. Maka berda-

sarkan pemaparan dan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Peranan Organisasi Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Negara Yunani".

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Organisasi Internasional**

Menurut Teuku May Rudy, mengenai Organisasi Internasional, yang mengungkapkan bahwa ;"*Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda.* May Rudy (2015: 27)."Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, adalah sebagai berikut Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan. Arena (forum / wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan per-

janjian - perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement dan lain sebagainya). Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.Clive Archer (2016:136-137)

Untuk fungsi dari organisasi internasional, menurut Clive Archer,ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yakni sebagai berikut :Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota, menghasilkan norma-norma (rejim), rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan (rule making), penerapan keputusan (rule application), penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction), tempat memperoleh informasi, operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan. Clive Archer (2016: 152-169).

### **2.2 Kerjasama Internasional**

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a). Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b).Pandangan atau harapan dari suatu negara

bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. c). Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. d). Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. e). Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan setiap pihak. Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai hal ini, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa *kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional*. Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. KJ Holsti (2014:652-653).

Kerjasama Internasional dilakukan se-kurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin akan dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen. Pelaksanaan Kerjasama Internasional permasalahannya bukan hanya terletak identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, Kerjasama Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah (konflik atau krisis) diantara dua atau lebih negara yang terkait.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Negara Yunani. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang didapatkan dari buku-buku, website internet. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka penelitiannya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi mengenai Peran Uni Eropa, serta sumber lain yang valid dan terpercaya. Dimana dalam masalah tersebut, selanjutnya diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

Pada dasarnya, hukum pada Organisasi Uni Eropa secara eksplisit tidak menyebutkan adanya kewajiban untuk membantu negara anggota yang mengalami permasalahan ekonomi. Beberapa perjanjian Organisasi Uni Eropa, khususnya Perjanjian *Maastricht* melarang pemberian *bailout* (dana pinjaman) kepada negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa). Bahkan Perjanjian Lisboa mengatur klausa

tentang larangan *bailout* (dana pinjaman). Keputusan untuk memberikan bantuan kepada Negara Yunani adalah keputusan yang kontroversial. *Bailout* (dana pinjaman) dilarang oleh Organisasi Uni Eropa untuk mencegah negara anggota secara sengaja melanggar aturan yang ditetapkan dalam SGP dan dikhawatirkan *bailout* (dana pinjaman) yang diberikan pada satu negara akan mendorong negara lain untuk mengajukan *bailout* (dana pinjaman). Akan tetapi, ada klausa pengecualian yaitu klausa pada pasal 122 Perjanjian Lisboa yang dapat dijadikan dasar bagi Organisasi Uni Eropa untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Negara Yunani. Pasal 122 Perjanjian Lisboa mengenai fungsi Organisasi Uni Eropa menyebutkan bahwa pemberian bantuan ekonomi memungkinkan untuk dilakukan tapi hanya apabila terjadi kondisi luar biasa. Krisis Ekonomi Negara Yunani dirasa dapat digolongkan sebagai kondisi luar biasa yang diatur oleh klausa ini.

“Apabila suatu negara anggota dalam kesulitan atau sangat terancam dengan kesulitan yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian luar biasa di luar kendali, Dewan, pada proposal dari Komisi, dapat memberikan, dalam kondisi tertentu, Union bantuan keuangan kepada negara anggota. ”Valiante

(2011: 28). Alasan utama Uni Eropa menyelamatkan Negara Yunani adalah karena Krisis Ekonomi Negara Yunani telah berhasil mengancam stabilitas Organisasi Uni Eropa dan menyebabkan kerentanan pada pemulihian ekonomi di benua Eropa secara keseluruhan setelah terjadinya krisis finansial global pada tahun 2008. Sepanjang terjadinya Krisis Ekonomi Negara Yunani, nilai euro terhadap dolar terus mengalami depresiasi. Salah satu peranan dari Organisasi Uni Eropa memberikan bantuan penyelamatan bagi Negara Yunani adalah untuk menghindari efek domino akibat Krisis Ekonomi Negara Yunani ke negara-negara lain anggota *Eurozone* (Zona Eropa), khususnya negara-negara yang sedang berada di posisi ekonomi yang sulit seperti Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Injeksi *bailout* (dana pinjaman) yang diberikan Organisasi Uni Eropa tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban Negara Yunani, melainkan juga untuk menahan Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol dari kejatuhan perekonomian. Dengan memberikan *bailout* (dana pinjaman) kepada Negara Yunani akan menjaga likuiditas Yunani, sehingga dapat memberikan waktu kepada Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol untuk merekapitalisasi perbankan dan memangkas defisit. Namun dalam hal ini ada

beberapa langkah konkret Uni Eropa untuk menyelamatkan Yunani dari masalah utang dan defisit anggaran serta fiskal sangatlah diperlukan. Karena bila tidak segera dilakukan, akibatnya akan fatal yaitu dapat meruntuhkan kepercayaan para investor kepada Negara Yunani secara khusus dan Organisasi Uni Eropa secara umum dan hal itu sangat mengancam eksistensi negara dan regional. Organisasi Uni Eropa memiliki tugas yang cukup berat, dimana pejabat kawasan ini harus dapat meyakinkan pasar atas pemecahan masalah defisit anggaran. Jika gagal mencari solusi atau masalah kian meningkat, pemodal akan semakin bertambah lari ke pasar (negara / kawasan) lain. Kondisi ini dapat menyebabkan tergantikannya posisi Organisasi Uni Eropa sebagai kawasan dengan iklim usaha yang prospektif. Organisasi Uni Eropa harus segera menerapkan sejumlah aturan dan menjaga kestabilan instrumen dan lembaga-lembaga mereka agar krisis tidak menyebar ke wilayah lain di dunia. Melihat dampak buruk yang telah dan yang akan ditimbulkan oleh terjadinya krisis ekonomi Negara Yunani, Organisasi Uni Eropa tentunya terdorong untuk segera mengatasi krisis ekonomi yang mengancam eksistensi regionalnya tersebut yaitu dengan melaksanakan Economic Adjustment Pro-

gramme. Perangkat kebijakan penghematan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Negara Yunani terintegrasi dalam *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi). Secara garis besar, *Economic Adjustment Programme* yang dilakukan memiliki dua tujuan, yaitu untuk memulihkan sustainabilitas keadaan fiskal Negara Yunani dan meningkatkan daya saing dari perekonomian Negara Yunani. Program yang akan dilaksanakan dibuat secara struktural untuk menciptakan perubahan yang drastis namun bertahap Verney (2009:35). Tujuan utama dari *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) adalah untuk mengoreksi ketidakseimbangan fiskal dan mengembalikan kepercayaan pasar. Untuk mendorong perekonomian, dibutuhkan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mampu memperbaiki ketidakseimbangan fiskal, mengurangi hutang dalam jangka waktu menengah, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mengembalikan daya saing. Pertumbuhan mungkin tidak akan muncul pada awal kebijakan diimplementasikan, namun dengan adanya kebijakan yang kuat dan berkelanjutan ini, diharapkan perekonomian akan terbentuk lebih baik dibandingkan dengan

yang sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan program tersebut dan untuk mencapai tujuan, segala elemen kebijakan finansial, fiskal, dan struktural akan digunakan.

## V. KESIMPULAN

Uni Eropa berperan dalam mengatasi krisis keuangan Negara Yunani dengan menggunakan *Economic Adjustment Program* (Program Penghematan Ekonomi) yang kemudian dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintahan Negara Yunani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Cliver. 2016. International Organization. Psychology Press
- May Rudy, Teuku. 2015. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa
- Holsti, KJ. *Politik Internasional. Kernagka Untuk Analisis*, Jilid II, (Terjemahan M. Tahirin Azhari) (Jakarta: Erlangga, 1988.
- Valiante, Diego. 2011. The Eurozone Debt Crisis: from Its Origins to A Way Forward, Brussels: Centre for European Policy Studies.
- Verney, Susannah. 2009. Flaky Fringe? Southern Europe Facing the Financial Crisis. Sout-Hern European Society And Politics "Efek Domino Krisis Yunani Terhadap Stabilitas Perekonomian Di Uni Eropa." <http://astriana>

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**  
**Jurnal AKRAB JUARA**  
Volume 4 Nomor 2 Edisi Mei 2019 (23-32)

Siburian.blogspot.com/search?updatemin=201  
2-01-01T00:00:00-08:00&updated  
max=2013-01-01T00:00:00  
08:00&maxresults=1 2 Maret 2019

Europa Summaries of European Union Legislation.“The European Central Bank (ECB)”  
[http://europa.eu/legislation\\_summaries/economics\\_and\\_monetary\\_affairs\\_institutional\\_and\\_Economics\\_framework/o10001\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/economics_and_monetary_affairs_institutional_and_Economics_framework/o10001_en.htm).  
4 Maret 2019